

**Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi Program
Pemberdayaan Perempuan**

(Efforts to Eliminate Sexual Violence through Implementation of Women's Empowerment Programs)

Naufal Asyiri Banuarli

Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea Indah, Kec Tamalanrea, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90245
E-mail: naufal@gmail.com

Ariana

Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea Indah, Kec Tamalanrea, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90245
E-mail: arianayunus@gmail.com

Nur Alfiyani

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Cisadane No. 3, Kelurahan Ketang Baru Lingkungan 3, Kecamatan Singkil
Manado, Sulawesi Utara, 95232
Email: nur.alfiyani@iain-manado.ac.id

Achmad Zulfikar

Perkumpulan Sarjana Hubungan Internasional Indonesia, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta Garden City, Cakung Timur, Jakarta Timur, 13910
E-mail: apa@kabarfikar.com

ABSTRACT

The role is a dynamic aspect, where the role is carried out based on the position / position attached, so when someone has carried out his function in accordance with the inherent status in himself, then he is said to have carried out a role. The role is more emphasis on community expectations of individuals, where the community expects the individual to be able to change the social order of the role he does. The role can certainly be done by everyone without exception, including the role of women leaders in fighting for women's interests. The intended role in this research is the efforts of female leaders in supporting efforts to eliminate sexual violence. This research was conducted in Makassar City. The method used is descriptive method with a qualitative approach. The technique used in data collection is through in-depth interviews with several informants as well as from other sources related to this research. The results showed that in supporting efforts to eradicate sexual violence, women leaders in Makassar had made efforts such as the Women's Change House (RPP) program, the Anti Sexual Violence campaign, Mother's School, and Parenting Education. While the program that will be carried out by female leaders is by holding a Mother School program.

Keywords: *Female Figure; Women's Interest; Elimination of Sexual Violence.*

ABSTRAK

Peran merupakan suatu aspek dinamis, dimana peran dilakukan berdasarkan posisi/ jabatan yang melekat, jadi ketika seseorang telah menjalankan fungsinya sesuai dengan status yang melekat dalam dirinya, maka ia dikatakan telah menjalankan suatu peranan. Peran lebih menekankan kepada pengharapan masyarakat terhadap individu, dimana masyarakat mengharapkan individu tersebut mampu merubah tatanan sosial atas peran yang dilakukannya. Peran tentu dapat dilakukan semua orang tanpa terkecuali, termasuk peran tokoh perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu upaya para tokoh perempuan dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni melalui proses wawancara mendalam (indepht interview) kepada beberapa informan serta dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual, para tokoh perempuan di kota Makassar telah melakukan upaya seperti program Rumah Perubahan Perempuan (RPP), kampanye Anti Kekerasan Seksual, Sekolah Ibu, dan Parenting Education. Sedangkan program yang akan dilakukan para tokoh perempuan yaitu dengan mengadakan program Sekolah Ibu.

Kata kunci: *Tokoh Perempuan; Kepentingan Perempuan; Penghapusan Kekerasan Seksual.*

PENDAHULUAN

Kekerasan Seksual merupakan bentuk tindakan pelecehan yang menyebabkan seseorang cidera bahkan dapat berujung pada kematian. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan seksual bukan hanya dampak secara fisik, akan tetapi dampak secara psikis. Bagi korban tindak kekerasan seksual, terkadang menimbulkan dampak buruk seperti stress, depresi, bahkan trauma yang berkepanjangan. Dengan kata lain, tindak kekerasan seksual merupakan tindakan tidak manusiawi dan bernuansa pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan, atau bertindak sadis, serta meninggalkan perempuan setelah melakukan tindak kekerasan seksual (Suyanto, 2010).

Kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang tentu berpotensi merugikan banyak orang dan tentunya merusak tatanan sosial. Kekerasan seksual terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masih kentalnya sistem nilai yang meletakkan posisi perempuan pada derajat terendah, faktor dari korban itu sendiri, dan lingkungan sekitar. Walaupun tidak selamanya kekerasan seksual selalu terjadi pada perempuan, akan tetapi yang paling rawan mengalami tindak kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Kejahatan seksual yang dialami perempuan dapat terjadi dalam beberapa tindakan seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

Kekerasan seksual dikenal sebagai salah satu bentuk kejahatan yang tidak mengenal tempat, maksudnya yaitu tindak kejahatan ini dapat terjadi dimanapun. Justru yang menjadi sebuah ironi pahit adalah pelaku dari tindak kekerasan seksual kebanyakan berasal dari orang-orang terdekat korban. Telah banyak tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh mereka yang mengenal korbannya.

Dengan adanya kecenderungan bahwa perempuan dikonotasikan dalam budaya patriarki sebagai makhluk lemah, maka menjadikan para pelaku dapat secara leluasa mengeksploitasi perempuan yang salah satunya dilakukan dalam bentuk tindakan fisik (kekerasan seksual). Terdapat dua jenis eksploitasi yang pada umumnya terjadi pada perempuan yaitu kekerasan seksual (sexual violence), dan pelecehan seksual (sexual harassment).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka tingkat kekerasan seksual yang tinggi. Tindak kekerasan seksual yang dilakukan pun beragam, mulai dari pelecehan, pemerkosaan, dan eksploitasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu 2013 hingga 2017.

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2013 hingga 2015, angka kekerasan seksual selalu mengalami peningkatan. Tetapi peningkatan paling signifikan justru terjadi pada kurun waktu 2016 ke 2017. Angka sebesar itu membuktikan bahwa kekerasan seksual masih menjadi satu dari banyaknya kejahatan di Indonesia yang menakutkan. Dari angka di atas, ternyata jumlah kasus yang dilaporkan cenderung lebih sedikit. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaporan kekerasan seksual cenderung sedikit, seperti rasa malu pada korban serta ketakutan korban jika apa yang menimpanya terpublikasikan.

Tabel 1. Angka Kekerasan Seksual yang Terjadi di Indonesia dari Tahun 2013 hingga 2017

Tahun	Jumlah Kasus
2013	279.688
2014	293.220
2015	321.752
2016	259.150
2017	348.446

(Sumber: Data Komnas Perempuan Tahun 2017 dalam Catatan Tahunan Tahun 2018)

Sebagai wakil masyarakat, para tokoh perempuan haruslah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan segala bentuk kepentingan dari konstituennya. Salah satu bentuk perjuangan tokoh perempuan dalam mendukung penghapusan kekerasan seksual salah satunya dapat dilakukan dalam bentuk program baik secara fisik ataupun non fisik (Apriani, 2013). Pada prinsipnya posisi perempuan sama dengan kaum laki-laki (Indrawati et al., 2021).

Tokoh perempuan tentu memiliki andil besar dalam membuat perubahan pada masyarakat, terutama dalam mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan perempuan. Banyak yang perlu diapresiasi atas kinerja dan kerja keras tokoh perempuan baik ditingkat nasional maupun lokal (Ramadhani, 2019). Pada tingkat nasional kita melihat bagaimana upaya kerja keras tokoh perempuan untuk menghasilkan Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Siregar, 2013). Sedangkan ditingkat lokal keberhasilan tokoh perempuan dalam memainkan peran pentingnya sebagai wakil dari masyarakat, contohnya seperti terbentuknya peraturan daerah di Bone tentang KDRT, dan Ranperda pengarusutamaan gender di Yogyakarta (Setiawan, Fajar Ahmad, Ani Purwanti, 2016).

Pencapaian tersebut membuktikan bahwa tokoh perempuan telah berusaha keras untuk mengurangi diskriminasi yang selama ini dialami oleh perempuan terutamanya masalah kekerasan seksual. Makassar merupakan salah satu kota yang memiliki angka kekerasan seksual yang tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2019, Makassar telah memperoleh 903 kasus kekerasan seksual.

Masih tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di kota Makassar menjadikan seluruh elemen masyarakat, pemangku kebijakan, serta penegak hukum untuk bekerja secara bersama-sama dalam upaya mengurangi angka kekerasan seksual. Upaya dukungan terhadap penghapusan kekerasan seksual salah satunya dapat dilakukan oleh para tokoh perempuan di kota Makassar. Selain sebagai pemangku kebijakan, tokoh perempuan juga harus mampu berperan aktif di masyarakat untuk mengurangi angka kekerasan seksual yang dapat diwujudkan dalam bentuk program-program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan.

Dengan adanya dukungan tokoh perempuan dalam upaya mendukung penghapusan kekerasan seksual, maka diharapkan jumlah angka kekerasan seksual dapat dikurangi jumlahnya. Sebagai upaya untuk mengurangi angka kekerasan seksual, maka

sudah semestinya tokoh perempuan memainkan peranan penting, mengingat biasanya tokoh perempuan cenderung lebih peka dan solutif untuk memperjuangkan kelompoknya (kaum perempuan).

Sehingga muncul harapan dari masyarakat di kota Makassar yaitu harapan agar tokoh perempuan mampu menjadi inisiator dalam mengurangi angka kekerasan seksual. Jika program yang dilakukan tokoh perempuan dalam upaya mendukung penghapusan kekerasan seksual berjalan efektif, maka bukan tidak mungkin angka kekerasan seksual yang selama ini marak terjadi dapat berkurang secara signifikan jumlahnya.

Pelibatan tokoh perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan jelaslah sangat penting, mengingat tokoh perempuan pada umumnya selalu membuat suatu program solutif yang berkaitan dengan kelompoknya (perempuan) (Muslimat, 2016). Berdasarkan penelitian Litbang Republika dengan The Asia Foundation menjelaskan bahwa perempuan memiliki sikap politik yang lebih mementingkan aspek keadilan, anti kekerasan dan lebih memperhatikan isu-isu yang terjadi dalam keseharian mereka.

Masalah tersebut membuat penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam bentuk karya tulis yang berjudul “Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual melalui Pengimplementasian Program Perempuan”.

METODE PENULISAN

Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe yang digunakan adalah deskriptif analisis, dimana penelitian ini difokuskan untuk mengumpulkan informasi serinci- rincinya mengenai suatu gejala yang ada. Peneliti menggunakan tipe penelitian ini agar mampu menjawab bagaimana peran tokoh perempuan di kota Makassar dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual. Informasi yang dikumpulkan yaitu yang berkaitan dengan upaya tokoh perempuan di kota Makassar dalam upaya mendukung penghapusan kekerasan seksual.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini juga dapat membantu peneliti untuk memahami data yang di dapat di lapangan untuk selanjutnya dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu penelitian kualitatif juga mampu memberikan kesempatan ekspresi dan penjelesan yang lebih besar (Harison, 2009).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), bahwa pada tahun 2019 kota Makassar menempati peringkat pertama sebagai kota di Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah kasus tindak kekerasan seksual tertinggi yaitu sebanyak 903 kasus. Angka tersebut melampaui kabupaten Bulukumba (107 kasus), Gowa (88 kasus), Pare- Pare (87 kasus), dan Soppeng (62 kasus).

Berangkat dari data tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran tokoh perempuan di kota Makassar dalam merespon tingginya angka kekerasan seksual disana, dan bagaimana peran yang

mereka lakukan dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual. Inilah yang akhirnya menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kota Makassar untuk mengetahui bagaimana peran tokoh perempuan di kota Makassar dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual.

Informan Penelitian

Penetapan informan penelitian dalam metode kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai sehingga subjek informan cenderung sedikit. Penelitian ini dilakukan dengan empat orang informan dengan rincian dua orang tokoh perempuan sebagai informan kunci, satu orang akademisi/pengamat permasalahan gender, dan satu orang mahasiswa.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Latar Belakang	Alasan Pemilihan Informan
1	Yenni Rahman	Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019 dan 2019-2024 dari Fraksi PKS	Karena berperan sebagai tokoh yang memiliki tugas memperjuangkan kepentingan masyarakat
2	Fatma Wahyuddin	Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019 dan 2019-2024 dari Fraksi Demokrat	Karena berperan sebagai tokoh yang memiliki tugas memperjuangkan kepentingan masyarakat
3	Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si	Akademisi sekaligus Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender (P3KG) Universitas Hasanuddin	Karena informan memiliki banyak informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, terutama yang berkaitan dengan perempuan
4	Radiatul Umrannah	Mahasiswa Universitas Hasanuddin	Karena peneliti ingin mengetahui pandangan informan terkait peran tokoh perempuan di kota Makassar dalam upaya memperjuangkan kepentingan perempuan

Sumber Data

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti melakukan pengumpulan data yang bersumber dari data primer ataupun data sekunder. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan secara langsung di lapangan, yaitu melalui wawancara mendalam dengan informan terkait. Proses wawancara difokuskan pada pertanyaan untuk menjawab “bagaimana peran tokoh perempuan di kota Makassar dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual yang saat ini jumlahnya masih tinggi. Wawancara dengan informan ini tentu sangat efektif karena data yang didapatkan lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Sebagai data pendukung, maka peneliti juga menggunakan data sekunder, maksudnya data informasi yang didapatkan selain dari informan. Maka dari itu peneliti menggunakan bermacam data sekunder pendukung seperti buku, jurnal, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang membahas tentang kekerasan seksual dan upaya untuk mendukung penghapusan kekerasan seksual.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam yang dilakukan pada informan. Wawancara dianggap sebagai metode pengumpulan data paling efektif karena selain informasi yang didapatkan sangat rinci, wawancara juga memberikan kejelasan mengenai suatu fenomena yang terjadi. Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan mengenai peran tokoh perempuan di kota Makassar dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual.

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyimpulkannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2011). Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pada tahapan reduksi data, peneliti melakukan eliminasi data dan menyesuaikannya dengan kebutuhan peneliti. Data yang telah mengalami reduksi data nantinya yang akan menjadi acuan bagi peneliti untuk selanjutnya menganalisis data tersebut. Data awal yang didapatkan awalnya dikumpulkan semua, kemudian di pilih-pilih dan diprioritaskan sesuai kebutuhan peneliti, dalam hal ini data yang diambil hanya yang berkaitan dengan peran tokoh perempuan di kota Makassar dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual.

Tahapan berikutnya adalah penyajian data, data yang telah direduksi sebelumnya disajikan berdasarkan kategorinya masing-masing. Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi dengan tujuan agar informasi yang didapatkan di lapangan mampu dipahami oleh pembaca. Selain memudahkan para pembaca nantinya, penyajian data juga mampu memberikan kemudahan bagi peneliti untuk melakukan tahapan selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data yang ada dianggap telah sesuai dengan kebutuhan peneliti. Penarikan kesimpulan juga merupakan hasil analisis pada data yang telah didapatkan di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membaca kembali data yang telah disajikan. Selanjutnya, menarik kesimpulan yang mencakup keseluruhan dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan konsep dan teori yang telah dibahas pada tinjauan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Masih maraknya tindak kekerasan seksual tentu menjadi kekhawatiran bukan hanya bagi masyarakat, akan tetapi juga bagi para tokoh perempuan yang tentu akan berupaya sangat keras untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya (perempuan). Fenomena kekerasan seksual saat itu seolah menjadi salah satu kejahatan luar biasa, ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa tindak kejahatan yang satu ini selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Jenis kekerasan seksual yang pada umumnya terjadi di Indonesia terdapat tiga jenis, yaitu pemerkosaan, pelecehan, dan pemaksaan/ eksploitasi. Walaupun perempuan tidak selamanya menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, akan tetapi perempuan menjadi korban dominan dari tindak kekerasan seksual. Oleh karena sudah sewajarnya tindak kekerasan seksual diberantas sampai kepada akar- akarnya, karena jika tidak, maka dikhawatirkan jumlahnya akan terus meningkat.

Tokoh perempuan sebagai seorang pemangku kebijakan tentu perlu kiranya untuk senantiasa memperjuangkan kepentingan konstituenya guna menciptakan ketertiban sosial. Salah satu yang masyarakat aspirasikan yaitu tentang upaya tokoh perempuan untuk mengurangi jumlah tindak kekerasan seksual terutama yang terjadi di kota Makassar, dimana aspirasi mereka kepada tokoh perempuan yaitu dengan membentuk progra,-program yang bertujuan untuk mendukung penghapusan kekerasan seksual.

Bagian ini menyajikan data yang diperoleh penulis melalui wawancara langsung kepada beberapa informan di lokasi penelitian yakni di Kota Makassar yang terdiri dari tokoh perempuan (*legislator*), masyarakat (*non legislator*), Kepala Pusat Studi Gender Universitas Hasanuddin, dan mahasiswa. Data yang akan disajikan dan dianalisis pada bagian ini adalah bagaimana para tokoh perempuan di kota Makassar berperan dalam upaya memperjuangkan kepentingan perempuan, terutama upaya mereka dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual

Perwakilan pemerintah pusat yang berada di daerah atau yang dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu memiliki tugas sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengutarakan aspirasinya. Biasanya aspirasi yang disampaikan memiliki kaitan erat dengan kepentingan konstituennya sehingga penting bagi para legislator untuk memperhatikan setiap aspirasi yang disampaikan kemudian merealisasikannya (jika aspirasi berwujud fisik) (Budiarjo, 2008).

Para tokoh perempuan tentu memiliki tanggungjawab untuk mengakomodasi apa yang diaspirasikan oleh masyarakat, itulah yang akhirnya menimbulkan suatu hubungan diantara keduanya yang dinamakan hubungan wakil dan terwakili. Inilah yang menjadikan mengapa proses perluasan partisipasi masyarakat lebih mudah dilakukan oleh pemerintah daerah ketimbang pemerintah pusat, mengingat daerah jauh lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan/ prioritas (Siregar, 2013).

Secara hierarki, muncul harapan kepada para tokoh untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi kesenjangan dalam bentuk apapun. Salah satu hal yang diperjuangkan oleh para tokoh perempuan yaitu memperjuangkan kepentingan perempuan dari berbagai tindak diskriminasi yang sering

menerpa mereka. Salah satu permasalahan yang masih marak terjadi hingga saat ini yaitu masih tingginya angka kekerasan seksual, permasalahan ini yang kemudian menimbulkan kecemasan pada masyarakat karena selain meresahkan masyarakat, tindakan seperti itu juga dapat mengancam keselamatan orang yang mengalami tindakan tersebut (Luhulima, 2014).

Suatu kekhawatiran mendalam yang tentu harus segera diselesaikan, karena jika dibiarkan maka tindakan kekerasan seksual akan semakin banyak jumlahnya dan tentu akan banyak korban. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah angka kekerasan seksual di kota Makassar yaitu mencapai 903 kasus, atau kurang lebih 50% dari total kasus kekerasan seksual yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2019 yang mencapai 1804 kasus.

Jumlah tersebut tentu menjadi kekhawatiran bukan hanya bagi masyarakat, akan tetapi bagi para tokoh perempuan selaku wakil masyarakat. Sudah semestinya bila para tokoh perempuan bekerja keras untuk menciptakan program- program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dengan harapan program- program tersebut dapat mengurangi angka kekerasan seksual di kota Makassar yang jumlahnya masih sangat tinggi.

Kekerasan seksual terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari kondisi lingkungan sosial, kultural, hasrat (nafsu), serta faktor pelaku ataupun korban itu sendiri. Berdasarkan pada studi yang mengkaji tentang kejahatan, dikatakan bahwa tidak ada satupun kejahatan yang tidak menimbulkan korban. Salah satunya yaitu kejahatan seksual yang marak terjadi saat ini, selain menimbulkan keresahan publik, tindakan ini juga dapat menimbulkan korban jiwa. Dalam sudut pandang korban, kerugian yang akan dialami yaitu kerugian secara fisik ataupun psikis. Tentu begitu memprihatinkan apabila kita melihat statistik angka kekerasan seksual yang selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Inilah yang kemudian menjadi Pekerjaan Rumah bagi para tokoh perempuan untuk memikirkan solusi terbaik untuk mengurangi angka kekerasan seksual yang masih marak terjadi di kota Makassar. Para tokoh perempuan diharapkan mampu berkontribusi lebih untuk mengatasi permasalahan ini, bukan hanya memperjuangkan kepentingan mereka di parlemen, akan tetapi turun langsung ke masyarakat.

Keterlibatan tokoh perempuan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tentu suatu anugerah bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Tokoh perempuan harus mampu memainkan perannya sesuai dengan jabatan yang melekat pada dirinya sebagai seorang legislator, salah satunya yaitu dengan tindakan preventif yang mereka lakukan untuk mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual.

Angka kekerasan seksual jumlahnya masih sangat tinggi terutama di kota Makassar, salah satu penyebabnya yaitu karena kurangnya moralitas sehingga para pelaku dapat dengan leluasa melakukan tindakan kekerasan seksual tanpa memikirkan konsekuensi yang akan didapat atas tindakannya tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Yenni Rahman selaku tokoh perempuan (legislator) DPRD Kota Makassar periode 2014-2019 dan 2019- 2024 dalam wawancara:

“menurut saya, kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan di kota Makassar akhir- akhir ini sangat marak, dan dari diskusi yang dilakukan para tokoh perempuan (legislator), komnas perempuan, dan aktivis perempuan diketahui bahwa para pelaku kekerasan seksual merupakan orang terdekat dari korban, sehingga perlu adanya solusi yang komprehensif agar kekerasan seksual dapat ditumpas sampai kepada akar- akarnya, sehingga dikemudian hari tindak kekerasan seksual tidak menimbulkan banyak korban jiwa, selain itu juga tindakan seperti ini harus segera disudahi karena bertolak belakang dengan hukum.” (Wawancara dengan Yenni Rahman selaku tokoh perempuan (*legislator*) DPRD Kota Makassar periode 2019-2024).

Angka kekerasan seksual yang terjadi di kota Makassar masih tinggi jumlahnya dan mirisnya para pelaku dari tindakan tersebut adalah orang- orang terdekat dari korban. Selain diperlukan solusi yang komprehensif dari para tokoh perempuan, diperlukan juga adanya upaya tegas dari pengadil untuk memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku tindak kekerasan seksual, karena dikhawatirkan jika tidak tegas, maka tindakan tersebut justru akan marak terjadi. Fenomena kekerasan seksual harus segera disudahi karena jika didiami, maka dikhawatirkan angkanya akan terus meningkat.

Sebagai bentuk pencegahan dari tindak kekerasan seksual, maka diperlukan adanya solusi konkrit untuk mengurangi angka kekerasan seksual yang marak terjadi di kota Makassar, karena jika tidak ada solusi, maka tindakan kekerasan seksual akan semakin mengakar dan menimbulkan banyak korban jiwa. Upaya yang dapat dilakukan para tokoh perempuan dalam upaya mendukung penghapusan kekerasan seksual salah satunya dapat dilakukan dalam bentuk program-program yang bersifat implementatif. Hal senada disampaikan oleh Yenni Rahman dalam wawancara:

“Sebenarnya tindak kekerasan seksual ini merupakan permasalahan bersama. Terkhusus bagi kami di komisi D DPRD Kota Makassar yang memang menanungi permasalahan ini, ini menjadi sebuah kekhawatiran yang harus segera ditangani. Kami tentu tidak ingin permasalahan kekerasan seksual terus terjadi karena jika tidak dicegah, maka akan semakin banyak menimbulkan korban jiwa dan bahkan bisa menjadi kultur. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka kami dari komisi D rutin melakukan koordinasi dengan komnas perempuan, P2TP2A, Lembaga Bantuan Hukum, dan organisasi perempuan lainnya di kota Makassar untuk secara bersama-sama memerangi kekerasan seksual agar supaya tercipta Makassar sejahtera tanpa kekerasan seksual, solusinya dapat dalam intervensi fisik ataupun non fisik yang tentu kami harapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat. Kami percaya bahwa program- program fisik akan mampu mengurangi angka kekerasan seksual yang saat ini jumlahnya sudah banyak.” (Wawancara dengan Yenni Rahman selaku tokoh perempuan (*legislator*) DPRD Kota Makassar periode 2019-2024).

Pernyataan di atas lalu dikonfirmasi oleh Fatma Wahyuddin selaku tokoh perempuan DPRD kota Makassar periode 2014- 2019 dan 2019-2024 Fraksi Demokrat.

“Permasalahan ini tentu menjadi kekhawatiran kita bersama, berhubung saya juga berasal dari komisi D, tentu kami yang menjadi aktor utama dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual yang ada di kota Makassar. Untuk menjalankan program- program kami, tentu kami rutin berkoordinasi dengan dinas perlindungan

perempuan, LSM, LBH, serta masyarakat.” (Wawancara dengan Fatma Wahyuddin selaku anggota DPRD Makassar periode 2014- 2019 dan 2019- 2024).

Perlu digaris bawahi bahwa dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual, para tokoh perempuan tidak dapat mengandalkan dirinya saja, diperlukan juga adanya kerjasama dari berbagai pihak seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para aktivis perempuan, serta elemen masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak tentu akan menjadikan program- program yang ada dapat berjalan secara maksimal dan menyeluruh. Tentu program yang memiliki target sasaran besar tidak dapat dilakukan oleh segelintir orang saja, dalam artian perlu juga kerjasama dengan berbagai pihak dalam implementasi programnya.

Terkait upaya mendukung penghapusan kekerasan seksual, maka para tokoh perempuan membentuk berbagai program pemberdayaan perempuan yang salah satu fungsinya yaitu memberikan edukasi kepada perempuan mengenai kekerasan seksual. Model program yang dilakukan para tokoh perempuan di kota Makassar dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual yaitu dengan program kampanye anti kekerasan seksual (AKS), dimana fokus dari program ini yaitu memberikan pengarahan kepada ibu-ibu mengenai bahaya kekerasan seksual dan upaya pengaduan jika menjadi korban tindak kekerasan seksual. Untuk terlaksananya program ini, maka para tokoh perempuan di kota Makassar secara rutin melakukan interaksi dengan komnas perempuan, LSM, LBH, dan tokoh masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Yenni Rahman selaku tokoh perempuan DPRD Kota Makassar periode 2014- 2019 dan 2019-2024:

“Untuk di level Makassar sendiri kami telah memiliki konsep baru sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual, salah satunya yaitu melalui program Kampanye anti kekerasan seksual. Sebenarnya program ini merupakan program unggulan kami (tokoh perempuan) DPRD Kota Makassar periode 2014- 2019, akan tetapi karena selama 5 tahun pertama program ini tidak mampu menyentuh seluruh daerah di Makassar, maka kami mencoba memodifikasi program yang telah ada sebelumnya dengan harapan program ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat bahkan masyarakat terpencil. Dan dengan rutin berkoordinasi dengan berbagai pihak sebelum implementasi program ini, kami meyakini bahwa nantinya program ini akan menjadi program solutif yang dapat mengentaskan tingginya angka kekerasan seksual. Kami yakin bahwa dengan rutin mengkampanyekan gerakan anti kekerasan seksual, maka ini akan menjadi suatu solusi agar jumlah tindak kekerasan seksual berkurang.” (Wawancara dengan Yenni Rahman selaku tokoh perempuan (*legislator*) DPRD Kota Makassar periode 2019-2024).

Makassar masih menjadi salah satu kota di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki angka kasus kekerasan seksual tertinggi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan seksual di kota Makassar mencapai 903 kasus dari total 1804 yang terjadi di kota Makassar selama tahun 2019. Itu artinya, lebih dari 50% kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sulawesi Selatan didominasi oleh kota Makassar.

Program yang bersifat implementatif tentu dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka kekerasan seksual terutamanya di kota Makassar yang dikatakan telah memiliki level kritis dalam permasalahan tindak kekerasan seksual. Fatma Wahyuddin selaku tokoh

perempuan yang memang begitu menggiati permasalahan diskriminatif dan kekerasan seksual kemudian memberikan penjelasan tambahan yang berbunyi:

“Pada DPRD Makassar Periode kami (2014-2019) memang semua tokoh perempuan memiliki program masing-masing terkait upaya memperjuangkan kepentingan perempuan, yang mana masing- masing program yang akan kami rundingkan untuk selanjutnya dijalankan. Apabila Yenni memiliki program Rumah Ibu, maka saya bergerak dengan program Rumah Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak. Tentu implementasi program ini akan melibatkan seluruh legislator terkhusus perempuan. Konsep program ini akan dilakukan dengan pembentukan suatu tempat yang berfungsi sebagai tempat pengaduan, perlindungan/ trauma healing bagi para korban tindak kekerasan seksual. Pada tahun 2015 yang lalu sebenarnya program ini telah dijalankan, akan tetapi belum mampu menjangkau seluruh wilayah di kota Makassar, oleh karena itu pada periode kedua ini, saya mencoba memodifikasi program ini dengan output akhirnya mampu menjangkau seluruh kelurahan yang ada di kota Makassar yang berjumlah 153 kelurahan, karena pada kepengurusan DPRD Makassar periodelalu, program ini hanya mampu menjangkau 35% nya saja atau baru sekitar 50 kelurahan saja.” (Wawancara dengan Fatma Wahyuddin selaku anggota DPRD Makassar periode 2014- 2019 dan 2019- 2024)

Berdasarkan analisis saya, upaya dukungan terhadap penghapusan kekerasan seksual belum berjalan dengan maksimal. Banyak faktor penghambat di dalam prosesnya. Akan tetapi, program implementatif setidaknya membuktikan bahwa sebenarnya tokoh perempuan di kota Makassar peka terhadap tingginya angka kekerasan seksual dan mereka juga meresponnya dengan membuat program-program implementatif dengan tujuan untuk mengurangi persentase angka kekerasan seksual di kota Makassar.

Harapan besar dari para tokoh perempuan di DPRD kota Makassar 2014- 2019 dan yang berkesempatan untuk maju ke periode kedua (2019-2024) yaitu program-program yang telah terbentuk sebelumnya dapat dimaksimalkan kembali sehingga mampu menjangkau seluruh masyarakat di Kota Makassar. Hal yang sama diungkapkan oleh Yenni Rahman selaku anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019 dan 2019-2024:

“Kami tentu memiliki cara baru dalam implementasi program sekolah ibu. Apabila pada periode pertama program ini belum berjalan efektif, maka target kami pada kepengurusan periode 2019-2024 yaitu memaksimalkan program ini. Dengan melihat dan memperhatikan kondisi sekitar, maka kami memiliki lima program pendukung untuk berjalannya program sekolah ibu ini, pertama adalah parenting yang dilakukan dengan cara pemberian materi tentang kekerasan seksual dan cara pengaduan apabila menjadi korban tindak kekerasan seksual, meningkatkan kapasitas perempuan melalui potensi diri, kemudian kedua yaitu pemberian keterampilan, kemudian ketiga sekolah anak, yang dilakukan dengan cara pemberian edukasi kepada anak agar supaya mereka tidak terpengaruh untuk menjadi pelaku tindak kekerasan seksual, mengingat tidak sedikit pula tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur, kemudian keempat yaitu program psikolog, dimana perempuan korban tindak kekerasan seksual bisa berbagi cerita sekaligus diberikan treatment agar mereka tidak syok atas apa yang telah mereka alami, sehingga tidak terjadi trauma berkepanjangan.” (Wawancara

dengan Yenni Rahman selaku tokoh perempuan (*legislator*) DPRD Kota Makassar periode 2019-2024).

Sebagai upaya untuk mendukung penghapusan kekerasan seksual yang merupakan bagian dari memperjuangkan kepentingan perempuan, maka para tokoh perempuan di kota Makassar secara rutin melakukan program-program fisik dengan harapan jumlah kasus kekerasan seksual disana dapat ditekan jumlahnya. Para tokoh perempuan periode 2014-2019 yang kembali diberi amanah untuk 5 tahun berikutnya (2019-2024) tentu berharap pada periode ini mereka dapat memaksimalkan program sebelumnya. Dengan demikian maka para tokoh perempuan juga membuktikan bahwa mereka memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap kondisi yang dialami masyarakat. Dalam skala kecil, tokoh perempuan juga rutin melakukan koordinasi dan diskusi-diskusi kecil sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi permasalahan di masyarakat dan bagaimana alternatif solusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Secara teoritis tentu program-program tersebut sangat ideal untuk diimplementasikan dan bisa saja menjadi desakan sekaligus upaya mendukung penghapusan kekerasan seksual terutamanya di kota Makassar, akan tetapi tidak dipungkiri bahwa tantangan yang dihadapi para tokoh perempuan seiring dengan implementasi program ini tidaklah sedikit. Ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Fatma Wahyuddin selaku legislator perempuan Kota Makassar periode 2014-2019 dan 2019-2024 dari fraksi partai Demokrat.

“Kami para tokoh perempuan tidak pungkiri bahwa tantangan dalam implementasi program-program kami salah satunya yaitu adanya tingkat jenuh dari peserta program ini, kemudian tantangan terakhir adalah masalah dana mengingat dalam program ini, dana yang digunakan masih dana dari komisi dan bukan dana yang dikucurkan pemerintah.” (Wawancara dengan Yenni Rahman selaku tokoh perempuan (*legislator*) DPRD Kota Makassar periode 2019-2024).

Setidaknya ada dua tantangan utama yang dialami dalam implementasi program ini. Pertama yaitu tingkat jenuh dari para peserta, mengingat program ini diimplementasikan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan sehingga akan lebih mudah menimbulkan tingkat jenuh dari peserta program. Kita tahu bahwa apabila program-program ini lebih mengarah pada kegiatan sosialisasi/ pelatihan, biasanya akan dengan mudah menimbulkan efek jenuh seperti bosan, malas memperhatikan, dan sebagainya.

Tantangan lainnya yaitu permasalahan finansial, mengingat dana yang digunakan dalam implementasi program-program ini merujuk pada dana komisi dan bukan dana pemerintah. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan finansial, maka para tokoh perempuan tidak menutup peluang bagi para donatur yang ingin berkontribusi demi terlaksananya program ini. Maksudnya yaitu tidak ada pembatasan bagi masyarakat yang ingin membantu secara finansial agar program ini dapat berjalan. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan Yenni Rahman berikut:

“Bagi para donatur yang ingin membantu guna terimplementasinya program-program kami, tentu kami tidak batasi peluangnya, karena bantuan dalam bentuk apapun, kami akan terima. Kami tidak pungkiri bahwa akan membutuhkan banyak biaya dalam implementasi setiap programnya. Apalagi ini target program kami bukan hanya puluhan kelurahan saja, akan tetapi mencakup seluruh kelurahan yang

ada di kota Makassar yang jumlahnya kurang lebih 150 kelurahan. Namun kami tidak bisa mebalas pemberian dari para donatur berhubung dana yang ada murni digunakan semata-mata untuk berjalannya program ini dan bukan berbasis profit.” (Wawancara dengan Yenni Rahman selaku tokoh perempuan (*legislator*) DPRD Kota Makassar periode 2019-2024).

Kita tahu bahwa implementasi program ini di setiap daerahnya berbeda. Apalagi dengan target program yang tidak sedikit, menjadikan finansial yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Belum lagi setiap daerah yang memiliki cara implementasi program yang berbeda-beda. Para tokoh perempuan di kota Makassar tentu telah melakukan rapat koordinasi dengan para stakeholder di setiap daerah dengan tujuan agar para stakeholder nantinya bisa membantu implementasi setiap programnya.

Ketika ada sinergitas antara legislator dan juga stakeholder di setiap daerah, maka bukan tidak mungkin seluruh program yang dibuat tokoh perempuan sebagai bentuk dukungan terhadap penghapusan kekerasan seksual dapat menjangkau sampai seluruh kalangan terutamanya perempuan dan anak karena keduanya merupakan korban dominan dari tindak kekerasan seksual.

Adapun program lainnya yang telah dilakukan para tokoh perempuan di kota Makassar guna mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual salah satunya yaitu RPP (Rumah Perubahan Perempuan). Konsep program ini relatif lebih sederhana, namun program ini mampu menjangkau hampir seluruh masyarakat secara luas. Ungkapan di atas senada dengan hasil wawancara dengan Anggota komisi D DPRD kota Makassar, Yenni Rahman:

“Berhubung saya berfokus pada permasalahan gender dan perbaikan derajat perempuan, oleh karena itu pada periode pertama saya menjabat, saya memiliki program bernama Rumah Perubahan Perempuan (RPP), dimana implementasi program ini yaitu dengan menggunakan salah satu rumah warga digunakan untuk ajang kumpul-kumpul, berdialog, dan diskusi kecil mengenai permasalahan yang mereka hadapi terutamanya kecemasan mereka terhadap tindak kekerasan seksual. Dalam implementasi program ini, tingkat keberhasilan program ini sangat besar yaitu hampir 90%. Artinya sudah mampu mencakup hampir seluruh masyarakat di kota Makassar. Selain dilakukan dalam model diskusi, program ini juga dirangkaikan dengan parenting education, dimana kami memberikan edukasi seputar kekerasan seksual dan upaya pencegahannya.” (Wawancara dengan Yenni Rahman selaku tokoh perempuan (*legislator*) DPRD Kota Makassar periode 2019-2024).

Program-program yang dilakukan oleh para tokoh perempuan tentu mampu menjadi sebuah solusi preventif untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terutamanya di kota Makassar. Program yang bersifat tatap muka seperti diskusi dan pengaduan biasanya cenderung lebih efektif untuk dijalankan karena selain dapat mengetahui langsung permasalahan utama yang dihadapi, kegiatan diskusi juga membuka ruang bagi para perempuan untuk menyalurkan aspirasinya kepada tokoh perempuan. Tentu tokoh perempuan memiliki berbagai program prioritas yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kekerasan seksual. Berikut hasil wawancara dengan Yenni Rahman:

“Menurut saya, program Sekolah Ibu yang merupakan program prioritas kami (tokoh perempuan) di kota Makassar kali ini tentu akan jauh lebih terarah dan konsisten, karena memiliki kurikulum yang jelas, dimana pada akhir program ini kami akan memberikan sejenis rapot untuk mengetahui sampai mana pengetahuan para perempuan mengenai materi yang telah diberikan. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai tokoh perempuan di DPRD Kota Makassar dalam mensukseskan program ini. Saya selaku perwakilan komisi D tentu memiliki tugas utama untuk menyukseskan program ini, karena program ini bagian dari aspirasi yang telah disampaikan masyarakat sebelum saya terpilih kembali di periode kedua ini.” (Wawancara dengan Yenni Rahman selaku tokoh perempuan (*legislator*) DPRD Kota Makassar periode 2019-2024).

Secara umum terdapat empat program yang menjadi prioritas para tokoh perempuan di kota Makassar dalam mendukung upaya penghapusan kekerasan seksual yaitu:

Kampanye Anti Kekerasan Seksual

Sebagai bentuk respon tokoh perempuan di kota Makassar terhadap maraknya tindak kekerasan seksual, maka tokoh perempuan membuat suatu program bernama gerakan AKS (Anti Kekerasan seksual), dimana program ini berfokus pada tindakan tokoh perempuan untuk memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dalam bentuk desakan mereka agar tindak kekerasan seksual segera dihilangkan sampai kepada akar-akarnya. Fokus yang paling utama dari program ini yaitu pada daerah- daerah yang memiliki jumlah angka kekerasan seksual yang tinggi. Dalam kampanye ini, para tokoh perempuan juga rutin melakukan pembelaan kepada hak- hak perempuan yang selama ini dipandang dikebiri. Tujuan dari kegiatan ini yaitu menghilangkan diskriminasi yang selama ini dialami oleh kaum perempuan. Kampanye ini dimulai di daerah- daerah terpencil yang dianggap kurang terjamah secara pendidikan, apabila apa yang dilakukan telah maksimal di wilayah terpencil, maka akan berpindah lagi. Program ini pun di dukung oleh stakeholder di masing- masing daerah sehingga berjalan dengan baik.

Rumah Perubahan Perempuan

Program lain yang dilakukan tokoh perempuan sebagai bentuk dukungan mereka terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual yaitu dengan program Rumah Perubahan Perempuan. Program ini dilakukan dengan beberapa metode, seperti diskusi seputar kekerasan seksual, sekaligus dapat digunakan sebagai tempat trauma healing jika menjadi korban tindak kekerasan seksual. Selain dalam bentuk diskusi, kegiatan lainnya dalam program ini yaitu seminar dan sekaligus berfungsi sebagai tempat aduan bagi mereka yang mengalami tindak kekerasan seksual. Fokus utama program ini yaitu memberikan edukasi kepada para perempuan untuk lebih mengenal tindak kekerasan seksual dan upaya pencegahannya. Dalam implementasi program ini, melibatkan juga berbagai pihak seperti dinas perlindungan perempuan, LSM, LBH, dan masyarakat. Tingkat keberhasilan program ini bisa dikatakan tinggi karena selain banyak pihak yang terlibat dalam prosesnya, cakupan wilayah yang dijangkau pun hampir seluruh daerah/ kelurahan di kota Makassar.

Sekolah Ibu dan Parenting Education

Program ini merupakan salah satu program unggulan tokoh perempuan di kota Makassar periode 2014- 2019. Program ini difokuskan pada pemberian pelatihan kepada kaum perempuan mengenai kekerasan seksual dan upaya pencegahannya. Prgram ini dilakukan dengan mendirikan tempat seperti sekolah, dimana peserta dari prgram ini awalnya berjumlah 40- 50 orang setiap kelurahan. Pada akhir program ini akan diadakan post test sebagai bentuk tindak lanjut dari program ini. Post Test dimaksudaka untuk mengukur sejauh mana pengetahuan perempuan mengenai kekerasan seksual sekaligus upaya pencegahannya. Dalam implementasi program ini, hasil yang ingin dicapai yaitu perbaikan kondisi perempuan yang dilakukan dalam bentuk pemberian edukasi seputar kekerasan seksual. Karena tingkat keberhasilan program ini yang dinilai kurang maksimal, maka dari itu tokoh perempuan di kota Makassar menjadikan program ini sebagai program unggulan, hanya saja yang menjadi pembeda yaitu pada mplementasinya diliputi dengan model- model pembelajaran yang edukatif dan solutif sehingga tingkat keberhasilannya lebih tinggi dari sebelumnya.

Program Sekolah Ibu dirangkaikan juga dengan beberapa kegiatan sehingga pesan/ materi yang disampaikan mampu tersampaikan dengan baik seperti Home Education, Seminar, dan juga Sosialisasi Peduli Kekerasan Seksual (PKS). Program ini juga dibarengi dengan Parenting Education, maksudnya bahwa selain diberikan edukasi tentang bahaya kekerasan seksual, para perempuan juga dilatih untuk bagaimana caranya memberikan pendidikan terbaik kepada anak sehingga nantinya anak tidak mudah untuk menjadi korban tindak kekerasan seksual. Edukasi ini juga berfungsi memberikan kesadaran kepada anak sejak dini mengenai bahaya laten dari tindak kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa. Ini tidak terlepas dari dampak negatifnya baik secara fisik maupun nonfisik, selain itu kejahatan ini juga memberikan ketakutan yang luar biasa terhadap masyarakat. Terdapat tiga jenis kekerasan seksual yang umum terjadi di Indonesia, yaitu pemerkosaan, pelecehan dan eksploitasi.

Kota Makassar merupakan salah satu kota di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki angka kekerasan seksual tertinggi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulsel, jumlah kasus kekerasan seksual pada tahun 2019 di kota Makassar yaitu sebanyak 903 kasus dari total jumlah kasus kekerasan seksual di Sulawesi Selatan yang mencapai 1804 kasus. Artinya lebih dari 50% kasus kekerasan seksual terjadi di kota Makassar. Jumlah tersebut tentu menjadi suatu kekhawatiran bersama terutamanya tokoh perempuan di kota Makassar yang secara substansial memiliki tugas untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Untuk mengurangi resiko yang semakin besar, maka peran tokoh perempuan menjadi yang diharapkan banyak masyarakat terkhusus perempuan. Dikatakan demikian karena para tokoh perempuan cenderung melakukan tindakan pencegahan yang berkaitan dengan kelompoknya (perempuan), sehingga mereka (tokoh perempuan) dianggap dapat menjadi sosok yang dapat mengatasi permasalahan ini. Salah satu yang diaspirasikan masyarakat kepada tokoh perempuan yaitu tokoh perempuan harus mampu memberikan solusi terkait permasalahan kekerasan seksual, baik dalam bentuk pemberdayaan kaum perempuan, sosialisasi, dan program lainnya yang dapat mengedukasi perempuan.

Beberapa program yang telah dilakukan para tokoh perempuan untuk meminimalisir tingginya angka kekerasan seksual sekaligus upaya mendukung perempuan yaitu dengan membentuk program Rumah Perubahan Perempuan (RPP). Dimana program ini dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan kampanye anti kekerasan seksual, dalam program ini juga melibatkan banyak pihak seperti komunitas penggiat permasalahan perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Bantuan Hukum. Akan tetapi masyarakat menilai bahwa program ini tidak terlalu berjalan efektif karena tidak mampu menjangkau seluruh wilayah di kota Makassar.

Menyadari bahwa program-program yang dilaksanakan belum berjalan efektif, maka para tokoh perempuan di kota Makassar membentuk program yang dinamai Sekolah Ibu. Dimana fokus kegiatan ini yaitu pada bidang parenting, edukasi moral, serta pada akhirnya bermuara pada kemandirian. Para tokoh perempuan di kota Makassar bahwa program ini diharapkan mampu berjalan efektif dan mampu menjangkau seluruh daerah di kota Makassar termasuk daerah terpencil. Ini dilakukan oleh para tokoh perempuan sebagai bentuk kekhawatiran mereka akan tindak kekerasan seksual yang semakin marak terjadi.

Mereka ingin mencoba memberikan model edukasi yang komprehensif kepada perempuan dengan harapan bahwa apa yang dilakukan tokoh perempuan dapat menjadi upaya dari dukungan mereka terhadap penghapusan kekerasan seksual. Para tokoh perempuan akan rutin melakukan tindakan yang mengarah pada perlindungan perempuan dan anak, sehingga setidaknya upaya yang mereka (tokoh perempuan) lakukan dapat mendukung penghapusan kekerasan seksual. Bagi para tokoh perempuan, selama kekerasan seksual masih marak terjadi, maka para tokoh perempuan akan gencar dengan program-program yang mengarah pada upaya penghapusan kekerasan seksual dan diskriminasi. Selain itu untuk bersama memerangi kekerasan seksual, para tokoh perempuan di kota Makassar juga mengajak seluruh pihak untuk turut serta dalam program-program yang dilaksanakan para tokoh perempuan terkait upaya memberikan edukasi kepada masyarakat. Memang apa yang dilakukan para tokoh perempuan ini tidak sepenuhnya menjadi solusi untuk mengurangi angka kekerasan seksual, tapi setidaknya program-program yang mereka lakukan membuktikan bahwa mereka sebenarnya peduli terhadap kesejahteraan perempuan yang selama ini menjadi korban dominan dari tindak kekerasan seksual. Ucapan terutama ditujukan kepada penyandang dana penelitian atau donor. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam penelitian ini.

REFERENSI

- Apriani, F. (2013). Keterwakilan Perempuan dalam Kancah Politik (Studi Kasus Pendapat Perempuan Kota Samarinda). *E Jurnal Fisip Unmul*, 1–16.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harison, L. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. PT Fajar Interpratama Offset.
- Indrawati, I., Abdullah, A., & Aksa, A. (2021). Teologi Gender dalam Tradisi Sibaliparri: Peran Perempuan Pesisir Polewali Mandar (The Gender Theology in the Sibaliparri Tradition: the Role of Coastal Women in Polewali Mandar). *Potret Pemikiran*, 25(2), 192–206.
- Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW (Menegakkan Hak Asasi Perempuan)*. Yayasan Obor.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslimat, A. (2016). Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. *Studi Gender Dan*

- Anak*, 3(2), 1–108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32678/jsga.v3i02.181>
- Ramadhani, D. (2019). *Modalitas Caleg Perempuan dalam PEMILU Legislatif di Kabupaten Sleman*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Setiawan, Fajar Ahmad, Ani Purwanti, L. T. A. L. . (2016). Diponegoro law journal. *Diponegoro Law Jurnal*, 5(3), 1–20.
- Siregar, W. Z. (2013). Representasi Perempuan di DPR, DPD, MPR, & DPRD 2009-2014: Komposisi, Peran, & Tantangan Perempuan Parlemen. *Jurnal Perempuan*, 18(4).
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Kencana.